

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi merupakan ideologi politik yang mayoritas menjadi pilihan negara-negara modern dalam menyelenggarakan pemerintahan. Secara substansial, demokrasi merupakan kekuasaan berasal dari, oleh dan untuk rakyat. Artinya rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara dan secara aktif menentukan arah penyelenggaraan kehidupan bernegara (Asshiddiqie, 2015: 293). Demokrasi menjadi pilihan sistem pemerintahan terbaik karena dapat mengakomodasi beragamnya kepentingan dan aspirasi masyarakat, serta berperan sebagai wadah pengikat kesepakatan nasional yang harus dihormati dan dijaga oleh seluruh masyarakat.

Ada dua pendekatan demokrasi, yakni pendekatan normatif dan pendekatan empirik. Pendekatan normatif merupakan ide dasar dari demokrasi yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan oleh sebabnya pemerintahan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam perkembangannya, ide yang didasarkan pada kedaulatan rakyat secara integral sukar untuk diterapkan karena seringkali saling bertentangan dan majemuk, meningkatnya populasi masyarakat rakyat juga sulit dihimpun untuk menyelenggarakan pemerintah secara langsung. Maka, muncul ide demokrasi yang terkonsentrasi dalam lembaga perwakilan, baik lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif yang anggota-anggotanya dipilih dari partai politik atau perseorangan sebagai artikulasi dan agregasi dari berbagai kepentingan rakyat. Sedangkan pendekatan empirik menekankan pada pengejawantahan demokrasi dalam kehidupan politik sebagai serangkaian prosedur yang mengatur rakyat untuk memilih, mendudukkan dan meminta pertanggungjawaban wakilnya di lembaga perwakilan. Wakil-wakil rakyat inilah yang kemudian membuat dan menjalankan keputusan publik (Gaffar, 1999: 11).

Negara yang demokratis memenuhi beberapa syarat diantaranya, partisipasi aktif masyarakat, persamaan dan kebebasan masyarakat, adanya suatu sistem perwakilan dan pemilihan umum (Sargent, 1986: 44). Pelaksanaan syarat demokrasi harus berlandaskan nilai-nilai dari demokrasi, yakni toleransi, kebebasan mengemukakan pendapat, menghormati perbedaan pendapat, memahami keanekaragaman dalam masyarakat, terbuka dalam komunikasi, menjunjung

nilai dan martabat kemanusiaan, percaya diri atau tidak menggantungkan pada orang lain, saling menghargai, mampu mengekang diri, kebersamaan dan keseimbangan (Zamroni, 2001: 32).

Berdasarkan syarat demokrasi, maka pemilihan umum (pemilu) sebagai sarana untuk mewujudkan pemerintah dari, oleh dan untuk rakyat. Pemilu sebagai pilar utama dalam sistem demokrasi, dan diatur secara konstitusional sebagai mekanisme sirkulasi pergantian elit politik dalam menjalankan sistem politik. Secara umum pemilu merupakan realisasi kedaulatan rakyat dan sarana memperkuat legitimasi rakyat. Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, pemilu identik dengan sarana artikulasi kepentingan warga negara untuk menentukan wakil-wakilnya. Sedangkan sebagai sarana memberikan dan memperkuat legitimasi politik dimaksudkan agar keberadaan kebijakan dan program yang dihasilkan dapat diwujudkan dan memiliki sanksi yang kuat (Haris, 1998: 49-50).

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut sistem demokrasi dan sudah menyelenggarakan 12 kali pemilu. Pemilihan umum yang diselenggarakan di Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat serta penerapan syarat-syarat dan nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemilihan umum dan mengevaluasi kinerja pemerintah demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Saat ini pemilu di Indonesia dilaksanakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) di Indonesia sebagai implikasi dari pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan pemilukada sebagai instrumen untuk mewujudkan demokrasi lokal. Pemilukada merupakan upaya untuk menciptakan akuntabilitas lokal (*local accountability*), kesetaraan politik (*political equity*) dan responsivitas lokal (*local responsiveness*), khusus untuk memberi pemerintahan daerah dalam menentukan nasibnya sendiri dalam memilih pemimpin dan menyelenggarakan pemerintahannya (Akbar, 2016: 97).

Secara konstitusional pemilukada diselenggarakan secara demokratis, melalui UUD 1945 Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”. Pemilukada di Indonesia dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan secara langsung sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 24 ayat (5) “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu

pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Rumusan tersebut secara substansi tidak berubah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Kontestasi pemilu mengharuskan kontestan politik untuk memiliki modal sosial sebagai kekuatan niscaya untuk memenangkan pemilu. Modal sosial merupakan keterlekatan dalam relasi sosial yang terjalin secara aktif meliputi rasa percaya, adanya kesamaan nilai yang mengikat pada perilaku dan hubungan sosial di masyarakat sehingga terbentuk kerjasama satu sama lain (Prusak and Cohen 2002). Berdasarkan definisi tersebut, modal sosial memiliki tiga unsur utama yang terdapat dalam institusi politik, yakni jaringan, norma atau nilai yang dianut dan kepercayaan masyarakat. Modal sosial kandidat merupakan dukungan kepada kandidat karena ketokohan sehingga menimbulkan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat serta menciptakan interaksi sosial dan jaringan-jaringan yang akan mendukungnya dalam pemilu. Modal sosial yang dimiliki kandidat bisa berupa tingkat pendidikan, pekerjaan awal, ketokohnya di dalam masyarakat (tokoh agama, adat, organisasi kepemudaan, profesi dan lain sebagainya). Sejumlah aspek ini mesti dimiliki oleh setiap kontestan karena sangat berguna sebagai basis memobilisasi dukungan politik masyarakat dan elit (Mbolang et al., 2020: 186). Selain itu, jaringan sosial menjadi salah satu aspek penting dalam modal sosial. Jaringan sosial yang dimiliki kandidat sebagai agen untuk membangun citra positifnya dan memobilisasi pemilih untuk menaikkan perolehan suara dalam pemilu. Jaringan sosial kandidat adalah aktor yang memiliki pengaruh dan kekuasaan dalam suatu kelompok masyarakat, yakni elit.

Dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia selalu ada kompetisi antar elit melalui keterlibatannya untuk mendukung dan memenangkan kandidat yang bertarung, baik dalam pemilihan Presiden maupun pilkada. Menurut Laswell, elit adalah para individu yang memiliki nilai tertinggi dalam masyarakat karena keahliannya yang secara aktif terlibat dalam pembuatan kebijakan (Budiarjo, 1991: 3). Ada beberapa kategori elit yang sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya dalam suatu bidang tertentu yakni elit politik, elit ekonomi, elit agama, dan elit aktivis. Elit politik diantaranya adalah para pemimpin partai politik, anggota DPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPD), serta Presiden dan Wakil Presiden. Elit ekonomi terdiri dari pengusaha atau kapitalis. Elit agama meliputi pemuka-pemuka agama, seperti Kiai, Ustad, pemimpin pesantren, Pendeta dan Uskup. Sedangkan elit aktivis terdiri dari pemimpin organisasi kemahasiswaan, pemuda, buruh dan tani.

Keterlibatan elit dalam pemilu sebagai aktor yang dipercayai kandidat untuk menaikkan perolehan suara karena aspek-aspek modal sosial yang dimiliki elit, yakni relasi sosial dan karakteristik yang melekat padanya, seperti kecerdasan, keahlian dan kedudukannya dalam institusi dan kelompok masyarakat tertentu. Dalam pemilu, elit menggunakan modal sosial yang dimilikinya untuk membentuk opini publik dan mempengaruhi masyarakat untuk mendukung kandidat yang didukungnya. Selain modal sosial, modal ekonomi yang dimiliki pengusaha menjadi salah satu modal sangat penting dalam pemilu untuk membiayai kampanye politik (Firmanzah, 2010: iv)

1.2 Rumusan Masalah

Dalam pemilukada baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota, keterlibatan elit lokal selalu mewarnai persaingan politik di tingkat lokal. Elit lokal merupakan individu-individu yang memegang peranan penting dalam mengambil keputusan ditingkat lokal (Samin & Zetra, 2019: 550). Keputusan politik tersebut tidak hanya dalam domain pembuatan kebijakan publik daerah, tetapi dalam ranah mengusung dan mendukung calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bertarung dalam pemilukada. Keputusan ini bisa memberikan acuan, rujukan dan pengaruh kepada masyarakat untuk mendukung pilihan politik para elit lokal. Elit lokal di Indonesia terdiri dari elit politik seperti Gubernur, Bupati/Walikota, Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten, serta pemimpin partai ditingkat daerah, elit ekonomi yang meliputi pengusaha atau kapitalis di daerah, elit agama yaitu pemuka-pemuka agama di daerah seperti Kiai, Ustad, Pendeta dan Uskup, elit kesultanan yaitu Sultan dan elit Suku yaitu kepala Suku.

Elit lokal merupakan salah satu aspek modal sosial yang dimiliki kandidat yang bertarung dalam pemilukada, yakni jaringan sosial. Kepercayaan kandidat kepada elit lokal karena modal sosial yang dimiliki dalam setiap individu elit lokal. Selain jaringan sosial yang dihasilkan dari relasi sosial, modal sosial merupakan segala jenis hubungan yang menjadi sumber daya dalam menentukan kedudukan sosial (Halim, 2014: 110). Maka modal sosial elit politik lokal adalah jaringan sosial dan kekuasaan serta kewenangan yang dimilikinya. Modal sosial elit agama adalah kedudukannya sebagai pemimpin moral keagamaan yang membentuk perilaku masyarakat serta jaringan sosial yang dimilikinya. Modal sosial elit Kesultanan dan elit suku adalah jaringan sosial, serta pengatur dan pengontrol masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma dan kepercayaan. Modal sosial elit ekonomi adalah jaringan sosial yang dimilikinya, dan yang

terpenting dari elit ekonomi adalah modal ekonomi berupa uang yang memiliki fleksibilitas dalam pemilukada.

Pemilukada serentak tahun 2020 di kabupaten Keerom di ikuti oleh tiga pasangan kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati. Pasangan kandidat yang bertarung dalam Pemilukada tahun 2020 di Keerom dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. 1 Pasangan Kandidat Dalam Pemilukada tahun 2020 di Keerom

Nomor Urut	Nama Kandidat	Partai Pengusung	Jumlah Partai Pengusung
1.	Muhammad Markum dan Malensius Musui	Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, Partai Harti Nurani Rakyat (Hanura), Partai Berkarya, Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).	8
2.	Piter Gusbager dan H. Wahfir Kosassih	Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).	3
3.	Yusuf Wally dan Hady Susilo	Idependen	-

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

Dukungan dari partai politik pengusung merupakan modal politik yang dimiliki oleh Piter Gusbager dan Wahfir Kosassih. Namun modal politik tidak menentukan kemenangan mereka dalam pemilukada. Maka diperlukan dukungan dari modal lain, yakni modal sosial. Modal sosial Piter Gusbager dan Wahfir Kosassih merupakan karakteristik yang melekat pada keduanya dan jaringan sosial yang dimiliki keduanya. Piter Gusbager dan Wahfir Kosassih petahana wakil bupati yang bertarung sebagai pasangan dalam Pemilukada tahun 2020. Wahfir Kosassih menjabat sebagai wakil bupati pada periode 2005-2010. Sedangkan Piter Gusbager mengisi jabatan wakil bupati yang kosong pada tahun 2018, ketika Muhhamad Markum sebagai wakil bupati terpilih

menggantikan posisi bupati yang meninggal dunia. Selain itu, Piter Gusbager merupakan putra asli Keerom yang memiliki relasi sangat baik dengan tokoh-tokoh agama dan kepala suku serta organisasi masyarakat di kabupaten Keerom. Sedangkan, Wahir Kossasih merupakan transmigran yang memiliki perhatian cukup besar dalam persoalan kerukunan umat beragama dan beliau memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh agama dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Beberapa aspek modal sosial Piter Gusbager dan Wahfir Kosasih diatas, membentuk elektabilitas, popularitas dan kepercayaan masyarakat, terutama dari segi putra daerah (orang asli Keerom). Pemimpin harus orang Papua asli merupakan implikasi dari otonomi khusus, sehingga pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah yang mewajibkan Bupati dan Gubernur harus orang Papua Asli (Lefaan, 2021: 41-43). Fenomena ini terjadi menjelang pilukada tahun 2020, dimana Majelis Rakyat Papua menolak pencalonan Bupati yang bukan orang Papua asli (BBC New Indonesia 2020). Namun demikian, populasi penduduk di kabupaten Keerom antara penduduk transmigran dan penduduk asli Keerom hampir berimbang, maka mengandalkan orang Keerom asli tidak menjamin untuk mencapai kemenangan dalam pilukada. Oleh karena itu, Piter Gusbager memilih Wahfir Kosasih sebagai perwakilan dari penduduk transmigran untuk mendampingi dalam pilukada.

Jaringan sosial menjadi aspek penting yang menggerakkan aspek-aspek lainnya dalam modal sosial yang dimiliki Piter Gusbager dan Wahfir Kosasih. Jaringan sosial keduanya adalah dukungan dari elit lokal di kabupaten Keerom. Keterlibatan elit lokal yang mendukung Piter Gusbager dan Wahfir Kosasih terdiri dari elit agama dan elit suku. Kedua elit tersebut memiliki kekuasaan, pengaruh dan kharisma yang mampu membentuk perilaku masyarakat dan memobilisasi dukungan suara dari masyarakat. Selain itu, peran elit suku dan elit agama dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pilukada.

Masyarakat di kabupaten Keerom merupakan masyarakat yang masih sangat kental kepercayaannya terhadap nilai-nilai kebudayaan dan adat-istiadat serta nilai-nilai agama yang menjadi pijakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kepala suku dan tokoh agama memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam masyarakat serta sangat dihargai dan dihormati. Disamping itu, pemilih di kabupaten Keerom mayoritas menggunakan standar kesamaan suku, etnis dan agama untuk memilih kandidat. Faktor inilah yang menjadi kekuatan dominasi kepala suku dan tokoh agama dalam membentuk pilihan politik masyarakat pada pilukada.

Alasan penulis menjadikan elit suku dan elit agama sebagai perwakilan elit lokal di kabupaten Keerom dalam pemenangan pasangan calon nomor dua, karena dinamika politik di kabupaten Keerom menunjukkan kuatnya peranan elit suku dan tokoh elit dalam pembuatan keputusan politik yang membentuk opini masyarakat, dibandingkan partai politik. Karena partai politik hanya memiliki otoritas dalam mengusung calon kandidat, tetapi dalam pemenangannya elit suku dan elit agama memiliki berperan yang signifikan. Maka elit politik selalu membangun jaringan kerjasama dengan elit suku dan elit agama untuk memobilisasi dukungan rakyat.

Dalam pemilu pada di kabupaten Keerom tahun 2020, elit suku dan elit agama memainkan peranan pentingnya untuk menentukan kemenangan pasangan calon Piter Gusbager dan Wahfir Kosasih. Elit agama berasal dari agama Protestan dan agama Islam. Agama Islam memiliki penganut terbanyak di kabupaten Keerom dengan jumlah sebesar 28.666 jiwa atau 46,52% dari 61.623 total jumlah penduduk di Kabupaten Keerom pada tahun 2020. Agama Protestan memiliki 18.768 penganut atau 30,46% dari 61.623 jumlah penduduk. Sedangkan agama Katolik memiliki 16.276 penganut atau 26,42% dari 61.623 jumlah penduduk (Badan Pusat Statistik 2021a: 191). Berikut ini rincian elit agama yang terlibat dalam mendukung pasangan calon Piter Gusbager dan Wahfir Kosasih:

1. Pendeta Ikadenus Hisage dari Gereja Pentekosta di Indonesia (GPDI)
2. Pendeta Herman Yocku dari Gereja Kristen Kalam Kudus (GKKK)
3. Kiai Mustajar dari kelompok Muhammadiyah
4. Pendeta Yeperson Kogoya dari Gereja Injili di Indonesia (GIDI)
5. Pendeta Mamberasar perwakilan dari Persekutuan Gereja-Gereja Keerom (PGGK)
6. Matius Sada perwakilan dari jemaat Katolik

Elit suku yang mendukung kandidat Piter Gusbager dan Wahfir Kosasih berasal dari suku Puncak Jaya, suku Tolikara dan Suku Bate. Suku Puncak Jaya dan Tolikara merupakan masyarakat Puncak Jaya dan Tolikara yang melakukan transmigrasi ke kabupaten Keerom. Sebagai daerah yang banyak dihuni oleh transmigran, suku yang berada di kabupaten Keerom tidak representasi dari masyarakat asli Keerom tetapi terdapat beberapa suku dari daerah Papua lainnya yang sudah lama menetap di Keerom. Jumlah suku anggota suku Puncak Jaya sebesar 8.200 jiwa, yang menyebar di distrik Arso, Arso Timur dan Skanto. Jumlah suku Tolikara sebesar 9.800 yang menyebar di distrik Arso, Arso barat, Arso Timur dan Skanto. Sementara jumlah suku Bate sebesar 13.800 yang menyebar di distrik Arso, Arso Barat, Arso Timur dan Skanto. Berikut ini rincian

kepala suku yang terlibat dalam kemenangan kandidat Piter Gusbager dan Wahfir Kosasih dalam pemilu pada tahun 2020:

1. Benyamin Kogoya sebagai kepala suku Puncak Jaya yang mewakili masyarakat Puncak Jaya yang berada di kabupaten Keerom.
2. Paleki Enembe sebagai kepala suku Tolikara yang mewakili masyarakat Tolikara yang berada di kabupaten Keerom.
3. Herman Tafor sebagai kepala suku Bate yang mewakili masyarakat asli di kabupaten Keerom.

Konstelasi politik di kabupaten Keerom sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan intelektual moral dan adat istiadat yang melekat pada sosok tokoh agama dan kepala suku. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di kabupaten Keerom mengedepankan nilai-nilai budaya dan agama, menempatkan kepercayaan masyarakat yang cukup tinggi kepada kepala suku dan tokoh agama sebagai elit lokal yang mampu memberikan jaminan keamanan, kesejahteraan dan keadilan.

Kepala suku sebagai pengatur dan pengontrol perilaku masyarakat untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai adat yang menjadi kepercayaan bersama. Dalam kehidupan sehari-hari kepala suku berperan sebagai mediator konflik dalam masyarakat, menghilangkan segmentasi yang bersumber pada kehidupan politik dalam masyarakat, menyelaraskan satu aturan yang berkaitan dengan mengatur, memelihara dan menjaga keamanan, serta menetapkan aturan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat adat (Jouwe et al. 2011). Sedangkan tokoh agama sebagai pelayan umat dan memberi teladan, pengajaran dan pembinaan terkait nilai-nilai kebajikan seperti cinta kasih, kebenaran, kesusilaan dan kebijaksanaan untuk membentuk moralitas dan perilaku umatnya.

Dalam ruang lingkup pemilu, elit agama dan elit suku memanfaatkan pengaruh dan kekuasaan dalam lingkungan agama dan suku untuk mendukung Piter Gusbager dan Wahfir Kosasih. Kemampuan mereka untuk membentuk perilaku masyarakat untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai agama dan adat-istiadat sebagai kekuatan utama mereka untuk mempengaruhi dan membentuk pilihan politik masyarakat dalam pemilu. Kemampuan elit agama dan elit suku dalam membentuk opini publik sebagai serangkaian pembangunan citra positif Piter Gusbager dan Wahfir Kosasih, sehingga bisa meningkatkan elektabilitas dan popularitas serta kepercayaan masyarakat. Selain pembentukan opini publik, peran elit agama dan elit suku adalah

memobilisasi masyarakat dalam ruang lingkupnya masing-masing untuk memilih Piter Gusbager dan Wahfir Kosasih. Peran berikutnya elit agama dan elit suku adalah melakukan konsolidasi jaringan antar elit untuk membentuk kekuatan politik ditingkat elit. Konsolidasi jaringan sosial antar elit dilakukan secara internal agama dan suku di Kabupaten Keerom.

Pemanfaatan agama dan budaya sebagai modal sosial mendapatkan ruang khusus dalam pelaksanaan pemilukada, karena pengaruh dan kekuasaan yang dimiliki elit agama dan elit suku dalam masyarakat. Faktor yang mendukung realisasi peran elit agama dan elit suku sangat penting, karena keberadaan masyarakat tradisional di Keerom yang didominasi oleh ciri perilaku politik berdasarkan faktor sosiologis daripada rasionalitas. Sehingga terbentuklah pemilih yang lebih mengedepankan persamaan identitas seperti agama, budaya, suku dan asal wilayah, daripada pemilih rasional yang mengedepankan kognitif dalam membuat pilihan politik.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yang menjadi acuan dalam keseluruhan penelitian ini. Adapun pertanyaan penelitian yang dimaksud adalah:

1. Mengapa para pasangan kandidat memerlukan para elit lokal?
2. Bagaimana peran elit lokal dalam kemenangan kandidat Piter Gusbager dan Wahfir Kosasih pada Pemilukada di Kabupaten Keerom?
3. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan peran elit lokal dalam kemenangan kandidat Piter Gusbager dan Wahfir Kosasih pada pemilukada di Kabupaten Keerom?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Akademik

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan akademik dari penelitian ini dilaksanakan adalah untuk:

1. Untuk mengetahui alasan para kandidat memerlukan para elit lokal
2. Untuk mengetahui peran elit lokal dalam kemenangan kandidat Piter Gusbager dan Wahfir Kosasih pada pemilukada di Kabupaten Keerom.

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mendukung peran elit lokal dalam kemenangan kandidat Piter Gusbager dan Wahfir Kosasih pada pemilu di Kabupaten Keerom.

1.4.2 Tujuan Praktis

Penelitian ini bertujuan memenuhi salah satu prasyarat dalam meraih gelar sarjana Ilmu Politik (S.Sos) pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia.

1.5 Signifikan Penelitian

1.5.1 Signifikansi Akademik

1. Fokus penelitian ini terkait elit lokal yang berpengaruh, bukan yang memerintah. Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perluasan literature dalam ilmu politik secara khusus terkait dengan studi peran elit lokal dalam konstelasi Pemilu.
2. Penelitian ini dapat memberikan referensi ilmiah terhadap para peneliti yang memiliki minat untuk meneliti peran elit lokal dalam Pemilu.

1.5.2 Signifikansi Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refleksi ilmiah bagi elit lokal yang menjalankan peranan pentingnya dalam Pemilu.
2. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bacaan bagi masyarakat pada umumnya yang ingin mengetahui terkait peran elit lokal dalam Pemilu.

1.6 Tinjauan Pustaka

Sebagai pertimbangan dan perbandingan dalam penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dan acuan dalam penelitian ini. Teori dan hasil temuan dalam penelitian terdahulu menjadi hal yang penting dalam menentukan perbedaan dan persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Amrianto, Universitas Sam Ratulangi, 2015, yang berjudul Peranan Elit Tradisional Dalam Dinamika Politik Lokal Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Wakatobi 2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teori yang

digunakan adalah teori elit oleh Suzanne Keller dan konsep peranan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa elit tradisional di kabupaten Wakatobi memiliki pengaruh yang sangat besar dalam masyarakat karena modal sosial, modal ekonomi dan modal budaya yang dimilikinya. Pengaruh ketokohan pada sosok elit tradisional sangat besar dalam menentukan kemenangan pemilukada, dibandingkan peranan partai politik (Amrianto 2015).

2. Penelitian Muhammad Samin dan Aidinil Zetra, Universitas Andalas, 2019, yang berjudul Peranan Elit Lokal Dalam Upaya Memenangkan Pasangan Sutan Riska-Amrizal Dt Rajo Medan Pada Pilkada Kabupaten Dharmasraya 2015-2020. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teori yang digunakan adalah peranan elit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran elite lokal dalam memenangkan pasangan Suka-Aman meliputi; pada analisa posisional, pencalonan Sutan Riska terjadi melalui musyawarah antar tokoh nagari Sungai Rumbai dan Kecamatan Koto Besar yang diikuti elite formal dari partai PDIP. Pasca penetapan bakal calon, dukungan pun diberikan oleh 48 dari 52 wali nagari yang tergabung kedalam forum Aswana dibawah pimpinan Rasul Hamidi ayah kandung dari Sutan Riska. Pada analisa reputasi, proses pencalonan Sutan Riska diikuti elite non formal dari kalangan para pemangku adat yang mengikuti musyawarah antar tokoh penjaringan bakal calon di nagari Sungai Rumbai. Kemudian setelah deklarasi penetapan pasangan calon, beberapa elite non formal lainnya baru bergabung kedalam barisan pendukung pasangan Suka-Aman dan ikut mengantarkan pasangan ini ke KPU. Keinginan elite mendukung pasangan Suka-Aman disebabkan oleh factor kekecewaan terhadap kepemimpinan petahana (Samin and Zetra 2019).
3. Penelitian Ahmad Bilal Tuhulele dan Sri Yunanto, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2022, dengan judul Peran Elit Adat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teori yang digunakan adalah teori elit Mosca, Pareto dan Keller serta teori partisipasi politik Hungtinton dan Nelson. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keterlibatan elit adat pada pemilukada tahun 2017 dilakukan dalam beberapa bentuk, yakni; *pertama*, melakukan sosialisasi politik termasuk menjadi panita dalam Pemilukada. Dalam sosialisasi mereka selain menyampaikan hal-hal terkait dengan Pemilukada, mereka juga menyampaikan kandidat

yang mereka dukung. Kedua, melakukan mobilisasi politik agar masyarakat berpartisipasi dalam Pemilu dan tidak melakukan Golput. Ketiga, menyelesaikan konflik yang mungkin timbul di masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu. Keempat, mendukung salah satu kontestan yang berkompetisi. Sebagian besar elit adat mendukung pasangan Ramli Umasugi-Amusatofa Besan dan memenangkan Pemilu.

Dari pemaparan singkat penelitian terdahulu di atas yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat dibandingkan untuk menemukan persamaan dan perbedaan dalam penelitian. Perbandingan yang dimaksud sebagai berikut:

1. Dalam penelitian tentang Peranan Elit Tradisional Dalam Dinamika Politik Lokal Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Wakatobi 2014, terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian penulis. Perbedaannya terletak pada lokasi dan waktu penelitian, sedangkan persamaannya terletak pada penggunaan pendekatan penelitian kualitatif dan teori elit serta konsep peran.
2. Penelitian tentang Peranan Elit Lokal Dalam Upaya Memenangkan Pasangan Sutan Riska-Amrizal Dt Rajo Medan Pada Pilkada Kabupaten Dharmasraya 2015-2020. Perbedaannya terletak pada lokasi dan waktu penelitian, sedangkan persamaannya terletak pada penggunaan pendekatan penelitian kualitatif dan teori elit. Dalam penelitian ini tidak menggunakan konsep peran sedangkan penulis menggunakan konsep tersebut.
3. Penelitian tentang Peran Elit Adat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017. Perbedaannya terletak pada lokasi dan waktu penelitian, sedangkan persamaannya terletak pada penggunaan teori elit dan pendekatan kualitatif. Namun dalam penelitian ini menggunakan teori partisipasi politik, sedangkan penulis tidak menggunakan teori tersebut.

1.7 Landasan Teoritik

1.7.1 Teori Elit

Secara umum menurut Suzanne Keller:

“Elit merupakan sekelompok orang yang memiliki posisi tertinggi di masyarakat dan memiliki kekuasaan serta keunggulan dibanding dengan masyarakat lainnya” (Keller, 1995: 28).

Definisi elit oleh Keller dipertegas dengan spesifikasi elit sebagai minoritas individu yang memiliki peran untuk melayani kolektivitas sosial. Entitas elit ini sebagai kelompok minoritas dalam masyarakat yang dipandang efektif dan bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat.

Perbedaan elit dengan masyarakat pada umumnya terletak pada kekuasaan dan dominasi yang melekat pada elit. Masyarakat secara umum tidak mempunyai kecakapan dan kekuatan untuk menduduki kekuasaan, implikasinya secara tidak langsung masyarakat akan dikuasai oleh kelompok minoritas elit sehingga memunculkan hierarkis yang tidak setara. Elit menduduki strata tertinggi dalam masyarakat di bandingkan masyarakat pada umumnya. Keller membagi dua pandangan elit yakni, elit fungsional dan elit moral. Menurut Keller:

“Elit moral merupakan elit yang berorientasi dengan keutamaan moral yang ada di masyarakat atau pemimpin moral. Sedangkan elit fungsional berkaitan dengan sekelompok elite yang memiliki tanggung jawab atas fungsi sosial suatu kelas atau kelompok dalam Masyarakat” (Keller, 1995: 31).

Berdasarkan pandangan Keller, elit agama dikelompokkan sebagai elit moral, sedangkan elit suku sebagai elit fungsional.

Eminensi atau kelebihan dari minoritas kelompok elit menurut Keller karena ada beberapa faktor. *Pertama*, posisi yang duduki elit merupakan kedudukan sentral dalam masyarakat. *Kedua*, sifat-sifat yang menjadi dasar pemilihan terhadap elit, memiliki keunggulan, baik itu berupa kebijaksanaan, keberanian, intelektual, keturunan, keahlian dalam pengetahuan dan ketrampilan. *Ketiga*, elit mempunyai tanggung jawab yang lebih besar daripada masyarakat lainnya. *Keempat*, kompensasi elit yaitu memperoleh bagian yang lebih banyak dalam persoalan untuk kebaikan hidup bersama (Keller 1995).

Perkembangan elit di masyarakat dipengaruhi oleh empat faktor utama yaitu, adanya pertumbuhan penduduk, spesialisasi jabatan, pertumbuhan organisasi formal dan perkembangan keragaman moral. Keempat faktor tersebut yang menjadikan elit semakin tumbuh dan berkembang, bervariasi serta bersifat otonom di masyarakat. Beragamnya sekelompok elit didukung dengan adanya perbedaan yang dimiliki oleh kelompok elit. Adanya diversifikasi ini terjadi dalam bidang politik, ekonomi dan sosial (Keller 1995).

Dalam analisis Keller menekankan pentingnya elit strategis, sebagai suatu kritisasi dan perkembangan dari kelas penguasa. Terbentuknya elit strategis berdasarkan suatu kompetensi individu yang terbentuk dengan menyingkirkan elite yang tidak berkompeten.

Dengan demikian, elit strategis dianggap sebagai elit yang terspesialisasi secara istimewa. Dalam posisinya, elite strategis dianggap setara dengan kelas penguasa. Elit ini bisa berasal dari elit agama, elit militer, elit ekonomi, elit intelektual dan elit adat sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing elit strategis dalam bidangnya. Elit strategis memiliki keistimewaan dan keunggulan. *Pertama*, elit strategis merupakan mediator antara masyarakat dengan elit lainnya. *Kedua*, fungsi elit strategis merupakan sebagai keterwakilan di masyarakat, peranan yang dimilikinya menempatkan mereka bertanggung jawab atas keputusan-keputusan jangka panjang. *Ketiga*, tindakan elit merupakan pengejawantahan cita-cita dan harapan dari masyarakat yang dikuasainya (Keller 1995).

Menurut La Ode Abdul Rauf, ada beberapa peranan elit dalam kehidupan kelompok sosial masyarakatnya:

“*Pertama*, peranan elit sebagai pemikir berwujud dalam upaya memikirkan cara dan solusi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, baik fisik maupun mental spiritual. *Kedua*, peranan sebagai penginisiatif, diantaranya menciptakan gagasan baru, memberikan motivasi, baik melalui keteladanan maupun usaha menciptakan iklim bagi terwujudnya perubahan yang dikehendaki. Keteladanannya biasanya merupakan cara yang efektif dalam merangsang keinginan warga masyarakat untuk menerima gagasan baru dan akan lebih efektif lagi jika berlangsung dalam suasana aman, bebas dari tekanan dan rasa takut. *Ketiga*, peranan elit sebagai perumus kebijakan dan perencana dapat berupa penciptaan nilai dan norma-norma yang mendasari dan mengatur perilaku sosial masyarakat. *Keempat*, peranan elit dalam memberikan arah, sebagai usaha preventif guna mencegah penyimpangan dari nilai dan norma-norma yang berlaku. Pemberian arah dapat berupa bimbingan dan petunjuk. *Kelima*, peranan elit sebagai pengawas lebih bersifat represif untuk memberi ganjaran kepada warga masyarakat yang menunjukkan perilaku menyimpang” (Rauf, 1999: 21-22).

Dalam kajian elit terdapat elit lokal yang memainkan peranannya ditingkat lokal. Menurut Keller, sebagaimana yang dikutip oleh Duverger bahwa:

“Peranan elit tradisional sebagai elit politik, yaitu orang atau golongan orang yang memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan politik. Elit lokal merupakan individu atau orang yang mengendalikan peran dalam keputusan-keputusan politik di level lokal” (Duverger, 2005: 163).

Sebagai elit non pemerintah, kelompok ini meliputi elit adat seperti pemuka adat, orang-orang yang berada di luar struktur kekuasaan pemerintahan daerah dan minim akan modal kapital untuk mempengaruhi kebijakan politik pemerintahan. Elit agama sebagaimana dalam gagasan La Ode Abdul Rauf bahwa:

“Sejumlah orang yang berpengaruh dan memiliki peranannya dalam hal sosial keagamaan melebihi warga masyarakat lainnya. Sehingga menempati kedudukan yang lebih tinggi” (Rauf, 1999: 1).

Sementara itu menurut Keller bahwa:

“Elit agama pada suatu waktu merupakan pengadil tertinggi dari pikiran dan perbuatan manusia. Elite agama termasuk elite penentu karena mereka sama-sama bertanggung jawab untuk dapat bertahan bersama-sama. Mereka merupakan pemimpin dari moralitas dalam Masyarakat” (Keller 1995).

Elit adat yang direpresentasikan melalui kepala suku memiliki peran dan fungsi yang sangat signifikan, diantara *pertama*, memberikan pedoman kepada anggota masyarakat, bilamana seharusnya bertindak laku dalam kehidupan bermasyarakat dan merupakan dasar dari tingkah laku tersebut adalah kebiasaan yang bersifat 15iteratur yaitu adat dan hukum adat. *Kedua*, menjaga keutuhan persekutuan dalam masyarakat, agar persekutuan tersebut tetap terpelihara dan tidak dirusakkan oleh berbagai tindakan anggota masyarakat yang tidak sesuai dengan adat dan hukum adat. *Ketiga*, memberikan pegangan kepada anggota masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Pengendalian sosial tersebut lebih bersifat pengawasan terhadap tingkah laku masyarakat sehingga hidup persekutuan dapat dipertahankan dengan sebaik-baiknya. *Keempat*, memperhatikan setiap keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dalam hukum adat, sehingga keputusan tersebut mempunyai wibawa dan dapat memberikan kepastian hukum yang mengikat semua anggota masyarakat. *Kelima*, merupakan tempat bersandarnya anggota masyarakat untuk menyelesaikan, melindungi, menjamin ketentraman. Karena itu setiap ada persengketaan maka Kepala Adat adalah satu-satunya tempat anggota masyarakat bersandar untuk menyelesaikan konflik (Haar, 1981: 225).

Sementara itu, dalam analisis Max Weber mengenai konsep otoritas, posisi elit sebagai individu yang memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi dan mengontrol orang dalam suatu kehidupan sosial. Karena otoritas ini tidak dimiliki oleh semua orang, hanya orang-orang tertentu yang memiliki parameter atau syarat tertentu saja. Menurut Max Weber, otoritas adalah:

“Kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi tindakan atau perilaku orang lain dalam suatu masyarakat. Otoritas melibatkan perasaan orang-orang yang patuh kepada penguasa atau pemimpin” (Whimster, 2007: 229).

Konsep otoritas yang dikemukakan oleh Weber sangat penting untuk memahami struktur kekuasaan dalam masyarakat, perubahan sosial dalam masyarakat, kepemimpinan dalam masyarakat, memahami mekanisme, prosedur dan birokrasi dalam pengambilan keputusan, serta perilaku sosial individu dan masyarakat.

Max Weber mengkonstruksikan konsep otoritas kedalam tiga bentuk, yakni otoritas tradisional, otoritas legal-rasional dan otoritas berdasarkan kharisma. *Pertama*, otoritas tradisional. Keabsahan otoritas tradisional berdasarkan tradisi, budaya dan adat-istiadat. Orang menjadi pemimpin bukan karena bakat dan kualitas kemampuannya, melainkan karena sudah diatur demikian di masa lampau, seperti anak mewarisi tahta ayahnya. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas tradisional berasal dari faktor keturunan atau garis keluarga atau kesukuan. Dalam artian wewenang ini lebih didasarkan kepada hubungan-hubungan yang bersifat personal atau pribadi dan kesetiaan pribadi seseorang kepada pemimpin yang terdahulu. Dalam wewenang tradisional, orang yang memegang kekuasaan adalah mereka yang dianggap mengetahui tradisi yang disucikan, sehingga jalinan-jalinan tradisional menjadi peranan utama (Siahaan, 1986: 202). Menurut Max Weber dalam Faqih Muhdyanto, dkk mengemukakan bahwa:

“Otoritas tradisional merupakan suatu otoritas yang dimiliki seorang pemimpin karena adanya hubungan keluarga dengan pemimpin terdahulu dari para pengikutnya, sehingga para pengikut yang telah mempunyai kepatuhan terhadap pemimpinnya terdahulu secara otomatis akan mengikuti dan patuh terhadap otoritas yang dibuat oleh pemimpin mereka yang baru” (Muhdyanto et al., 2017: 6).

Otoritas ini berlandaskan kepercayaan kepada kesucian peraturan yang sudah berabad-abad lamanya dan kekuasaan-kekuasaannya. Di komunitas pedusunan kecil, otoritas dipegang oleh mereka yang sudah tua di desa itu karena orang paling tua yang dianggap paling meresapi kearifan tradisional dan memenuhi syarat kewibawaan untuk memegang otoritas atau wewenang tersebut. Dalam wewenang tradisional tugas-tugas para anggota ditentukan secara majemuk, akan tetapi hak-hak istimewa dan kewajiban bisa saja disesuaikan berdasar keinginan si penguasa. Hal ini terjadi karena penempatan pejabat yang dilakukan atas dasar pertalian-pertalian pribadi (Giddens, 1986: 192-193).

Kedua, otoritas legal-rasional. Otoritas legal-rasional disebut juga sebagai otoritas legal, yaitu otoritas yang didasarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat, misalnya pemimpin organisasi modern, ketua RT/RW yang dipilih secara langsung dengan

musyawarah warga RT/RW. Mereka memperoleh otoritas tertinggi dari hukum masyarakat. Otoritas rasional dibangun atas dasar legitimasi (keabsahan) yang merupakan hak bagi pihak yang berkuasa. Menurut Max Weber dalam Siahaan mengemukakan bahwa:

“Otoritas legal-rasional didasarkan pada aturan hukum, prosedur, dan birokrasi. Dalam otoritas legal-rasional, orang-orang mematuhi peraturan dan aturan yang ditetapkan secara sah dan rasional, dan pemimpin atau penguasa bertindak sesuai dengan hukum dan prosedur yang ada” (Siahaan, 1986: 201).

Dalam otoritas legal-rasional, keabsahan pemegang kekuasaan itu untuk memberikan perintah berdasarkan peraturan yang telah disepakati bersama, membuat peraturan dan menjalankannya berdasar pada konstitusi yang ditafsirkan secara resmi. Perintah-perintah yang diberikan juga berdasarkan norma-norma yang impersonal (tidak bersifat pribadi). Di sini pemegang kekuasaan dalam memberi perintah tidak menggunakan kekuasaan itu sebagai hak pribadinya, melainkan sebagai suatu institusi impersonal. Institusi ini dibentuk oleh orang-orang atas dasar hukum untuk mengatur kehidupan mereka (Siahaan, 1986: 202). *Ketiga*, otoritas kharismatik. Tipe otoritas karismatik, seseorang dipisahkan dari orang biasa dan diperlakukan seolah-olah ia memiliki kekuatan supranatural, supramanusia yang tidak dimiliki orang lain. Menurut Max Weber dalam Muchtarom, otoritas kharismatik adalah:

“Anugerah Ilahi yang diberikan kepada seseorang yang dikehendaki-Nya. Tidak ada seorangpun yang dapat memberikan campur tangannya dalam pemilihan anugerah itu. Karisma mempunyai sifat luar biasa, berada di luar jangkauan akal manusia (*superhuman*), ini dapat disamakan dengan mukjizat yang diberikan pada para nabi ataupun kekuatan magis yang dimiliki orang-orang tertentu pada penganut keyakinan primitif. Karena mempunyai karisma yang bersifat luar biasa maka pemiliknya dianggap sebagai pemimpin atau panutan dalam masyarakat, seperti halnya para nabi ataupun ulama yang memimpin masyarakat ke jalan keselamatan. Karisma buatan dapat diperoleh melalui upaya-upaya tertentu seperti bertapa maupun perilaku religius lainnya” (Muchtarom, 2000: 17-18).

Tokoh kharisma yang bersangkutan biasanya memberikan bukti dari keasliannya dengan melakukan hal-hal yang ajaib atau dengan mengeluarkan wahyu-wahyu yang bersifat ketuhanan. Tanda-tanda berlakunya otoritas atau wewenang kharismatik ini adalah para pengikut mengakui keaslian otoritas itu dan bertindak sesuai dengan kewajiban tersebut. Dalam wewenang kharismatik tidak didasarkan atas pemilihan yang bersandar pada hak-hak istimewa karena keterkaitan pribadi, tidak didasarkan atas pemilihan kemampuan-kemampuan teknis, tidak ada hierarki bawahan yang pasti, tidak ada karier

seperti yang ada dalam organisasi birokrasi, tidak memiliki sarana bantuan ekonomi yang terorganisasi sistematis, penghasilan diperoleh dari berbagai sumbangan atau rampasan dan tidak diorganisasi di sekitar prinsip-prinsip hukum yang pasti. Akan tetapi, pemimpin kharisma memiliki banyak teman karib yang ikut memiliki bersama kharisma itu maupun mereka yang juga memiliki kharisma (Giddens, 1986: 198).

Berdasarkan tiga tipe otoritas yang diklasifikasikan oleh Max Weber maka untuk kebutuhan dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan konsep otoritas tradisional karena berkaitan dengan elit suku yang memiliki kekuasaan dan otoritas didasarkan pada warisan budaya secara turun-temurun, bukan didasarkan pada prosedural legal dan kepemimpinan yang kharismatik.

Penulis menggunakan teori elit yang dikemukakan oleh Suzanne Keller karena sesuai dengan karakteristik elit lokal di Kabupaten Keerom, secara khusus elit agama dan elit suku. Peran utama yang melekat pada elit agama adalah sebagai panduan dan pemberi saran dan masukan kepada umatnya dalam membentuk moralitas dan tingkah laku umatnya. Sementara itu, karakteristik elit suku sebagai pemberi pedoman, mediator penyelesaian konflik dan menjaga keutuhan kehidupan komunitas sukunya. Maka, kedua elit ini mempunyai otoritas sebagai pembuat keputusan dalam kehidupan komunitasnya masing-masing yang mengikat seluruh anggotanya. Sehingga dalam Pemilukada, kedua elit ini bertindak sebagai aktor yang mempengaruhi pilihan politik anggotanya masing-masing untuk mendukung dan memilih pasangan kandidat Piter Gusbager dan Wahfir Kosasih. Karena berbeda dengan sistem pemilihan di daerah Papua lainnya yang menjadikan elit suku sebagai *voiter* utama, di Kabupaten Keerom meskipun elit suku dan agama mempunyai pengaruh dan otoritas yang kuat terhadap anggotanya masing-masing tetapi dalam pemilihan anggotanya tetap sebagai *voiter* utama. Dengan kata lain, hak pilih anggotanya tidak diwakilkan kepada elit.

1.7.2 Peran Elit Dalam Pemilihan Umum

Penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) tidak terlepas dari peran elit dalam mendukung kandidat-kandidat yang bertarung untuk memenangkan kursi kekuasaan. Elit merupakan segelintir orang dalam masyarakat memiliki kedudukan tertinggi serta menjadi pemimpin dari kelompok masyarakat tertentu. Secara umum menurut Arifin, elit merupakan pemimpin yang setidaknya memiliki enam peran yang harus dilaksanakannya:

“*Pertama*, pematangan atau penyiapan pengikut, adalah peranan dalam hal penerangan maupun propaganda peranan penerangan ini dimaksudkan memberikan keterangan yang faktual kepada orang-orang sehingga mereka dapat memiliki pengertian yang mendalam mengenai suatu hal, yang menyebabkan timbulnya kemauan untuk mengikuti pemimpin sesuai dengan rasa hati dan akal. *Kedua*, *Human Relation* adalah peranan yang berkaitan dengan kegiatan memotivasi orang atau keseluruhan proses pemberian motivasi agar orang mau bergerak, yaitu pemimpin harus dapat memberikan bimbingan, menciptakan suasana kekeluargaan dan memberikan hadiah atau hukuman. *Ketiga*, menjadi teladan yaitu peranan dalam hal ini menjadi figur yang patut dicontoh dan diteladani bawahan, dengan cara menampilkan sikap atau perilaku dan ucapan yang baik. *Keempat*, persuasi dan pemberian perintah yaitu peranan yang menunjukkan dimana antara kedudukan pemimpin dan pengikut tidak terdapat batas-batas yang jelas, pemimpin tidak menggunakan kekuatan atau kekuasaan, sehingga orang-orang yang diajaknya bersedia mengikuti pemimpin dengan kemauan dan rasa tanggung jawabnya sendiri. *Kelima*, penggunaan sistem komunikasi yang cocok yaitu bagaimana pemimpin melaksanakan dan menggunakan alat-alat komunikasi yang cocok sehingga apa yang terjadi maksud dan tujuannya dapat diterima dengan jelas. *Keenam*, penyediaan fasilitas Apabila sekelompok orang sudah siap memenuhi ajakan si pemimpin, maka orang tersebut harus diberikan fasilitas atau kemudahan. Dengan demikian ia merasa diperhatikan dan berupaya untuk memenuhi apa yang akan menjadi perintah” (Pamudji 1986: 114-121).

Dalam pemilu elit mempunyai peranan yang sesuai dengan kapabilitas dan kapasitasnya. Menurut Abdul Chalik peranan elit dalam pemilu pada dasarnya harus sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing seperti kehidupan budaya, agama, politik dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Menurutnya setidaknya ada beberapa peran elit secara umum dalam setiap pemilu:

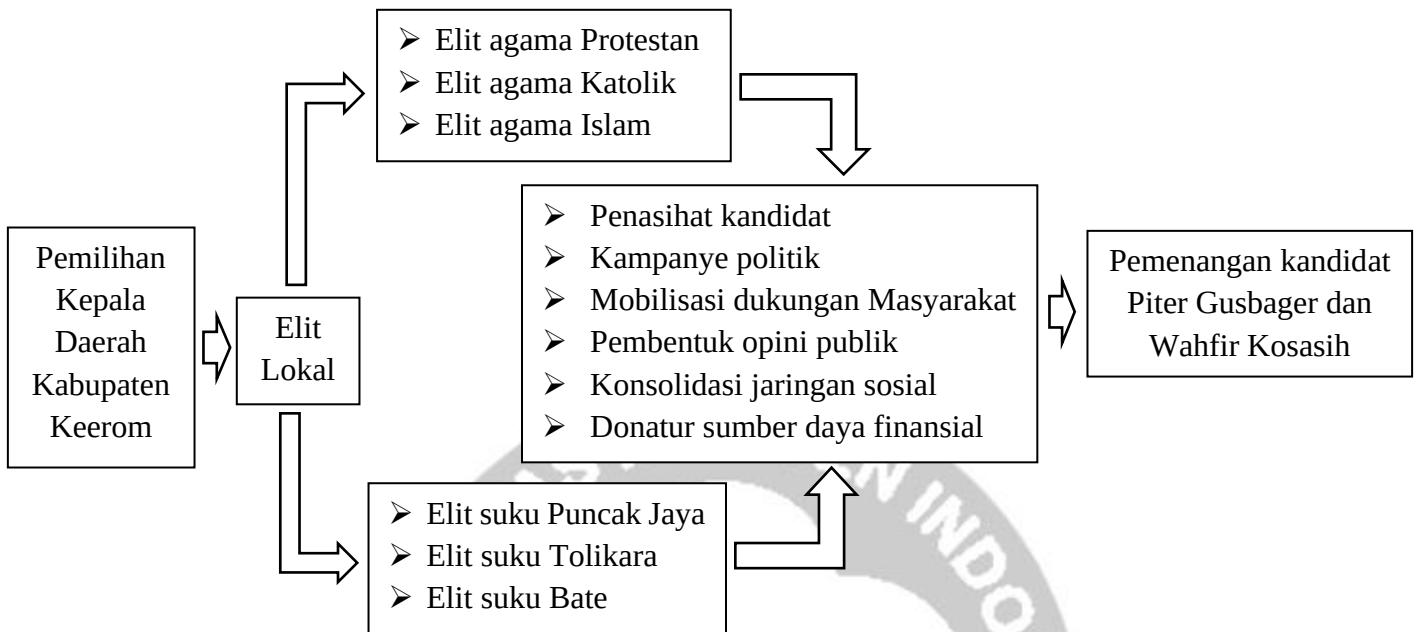
Pertama, penentu dan penasihat kandidat. Penentu kandidat merupakan peran elit politik yang dimiliki oleh elit partai politik. Namun ada juga pengaruh dan intervensi elit lainnya, seperti elit ekonomi yang memiliki modal untuk membiayai kampanye politik. Penasihat kandidat tidak hanya untuk elit politik dan ekonomi, tetapi bisa mencakup elit agama, suku dan lain-lain yang berperan untuk memberikan saran dan rekomendasi sebagai strategi untuk memenangkan pemilu. *Kedua*, kampanye politik. Peran ini dilakukan oleh elit dalam merumuskan strategi dan pesan politik dalam kampanye serta mengorganisir masyarakat untuk terlibat dalam kampanye yang diselenggarakan oleh kandidat. *Ketiga*, mobilisasi dukungan masyarakat. Elit pada dasarnya mempunyai basis massa yang dipimpinnya, yang bisa menjadi kekuatan utama bagi elit untuk mengorganisir mereka dalam memilih kandidat yang didukungnya atau dalam melakukan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. *Keempat*, donatur sumber daya finansial. Elit biasanya menjadi donatur utama bagi kandidat atau partai politik dalam melaksanakan kampanye politik serta aktivitas-aktivitas lainnya yang mampu memberikan sumbangsih positif bagi kemenangan mereka. *Kelima*, pembentuk opini

publik. Peranan ini dilakukan elit untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas kandidat ditengah masyarakat untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat melalui kegiatan kampanye dan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung. *Keenam*, konsolidasi jaringan sosial. Peran ini dilakukan elit untuk memperkuat jaringan sosial antar elit serta menyatukan pandangan dan kekuatan untuk mendukung kandidat tertentu dalam pemilu” (Chalik 2017: 141-153).

Penulis menggunakan konsep peran elit dalam pemilu menurut Abdul Chalik, karena secara khusus dan spesifik menjelaskan peran elit dalam pemilu. Dari keenam poin peran elit dalam pemilu yang dikemukakan oleh Abdul Chalik, penulis menggunakan lima poin yang sesuai dengan kebutuhan penelitian penulis diantaranya; penentu dan penasihat kandidat, kampanye politik, mobilisasi dukungan masyarakat, pembentuk opini publik dan konsolidasi jaringan sosial. Peranan, pengaruh dan otoritas elit suku dan agama terhadap anggotanya masing-masing dalam kehidupan sehari-hari ditransformasikan kedalam politik untuk mendukung pasangan kandidat Piter Gusbager dan Wahfir Kosasih pada Pemilu pada dengan menjalankan kelima peran tersebut.

1.8 Kerangka Alur Pemikiran

Kerangka berpikir adalah suatu dasar pemikiran yang mencakup penggabungan antara masalah, teori dan metode yang nantinya dijadikan landasan dalam melakukan menulis karya tulis ilmiah. Karena menjadi dasar, kerangka berpikir ini dibuat ketika akan memaparkan konsep-konsep dan teori dari penelitian. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori dan konsep berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir juga bisa dibilang sebagai visualisasi dalam bentuk bagan yang saling terhubung. Jadi secara umum contoh kerangka berpikir adalah alur dari suatu permasalahan yang ingin dipaparkan di dalam karya tulis ilmiah, mulai dari awal hingga akhir.



Gambar 1.1. Bagan Kerangka Alur Pemikiran

Dalam pemilukada di Kabupaten Keerom tahun 2020, elit lokal merupakan salah satu aspek modal sosial yang dimiliki kandidat. Elit lokal dalam pemilukada di kabupaten Keerom terdiri dari elit agama dan elit suku. Elit suku terdiri dari elit suku Puncak Jaya, elit suku Tolikara dan elit suku Bate yang merepresentasikan keanggotaan sukunya masing-masing. Sedangkan elit agama terdiri dari elit agama Protestan, elit agama Katolik dan elit agama Islam sebagai perwakilan dari umatnya masing-masing. Ketiga agama ini merupakan agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat di Kabupaten Keerom.

Peran Elit agama dan elit suku dalam masyarakat sebagai pembentuk perilaku masyarakat untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan adat-istiadat serta ajaran-ajaran agama menjadi suatu kekuatan utama mereka dalam menjalankan perannya pada pemilukada. Peran elit agama dan elit suku dalam pemilukada adalah sebagai penasihat kandidat, kampanye politik, mobilisasi dukungan masyarakat, pembentuk opini publik, konsolidasi jaringan sosial, serta donatur sumber daya finansial.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial dan lain-lain. Salah satu alasan mengapa menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman peneliti, karena metode ini dapat menemukan dan memahami makna yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan suatu yang sulit untuk dipahami (Creswell, 2016: 46).

Pendekatan penelitian kualitatif dipilih penulis karena ingin mengetahui, menemukan dan mendeskripsikan perilaku elit lokal yang terdiri dari elit agama dan elit suku melalui peranannya dalam memenangkan kandidat Piter Gusbager dan Wahfir Kosasih pada pemilukada di kabupaten Keerom tahun 2020.

1.9.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah fenomenologi. Menurut Creswell, fenomenologi merupakan penelitian yang mendeskripsikan mengenai pengalaman atau fenomena yang dialami oleh seseorang (Creswell 2016). Lebih lanjut, Daymond dan Halloway menjelaskan bahwa terdapat beberapa macam kajian yang dilakukan dalam metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pertama, fenomenologi sosial yaitu penelitian sosial fenomenologi dimana peneliti melakukan penelitian yang berfokus pada tindakan sosial dan pengalaman kelompok. Kedua, fenomenologi 22literature22tal yang menjelaskan bahwa penelitian ini menekankan pada pengalaman individu seseorang. Ketiga, fenomenologi hermeneutika yaitu peneliti menginterpretasikan teks sesuai dengan konteks budaya, situasi dan sejarah tempat suatu fenomena terjadi (Daymon and Holloway 2008).

Berdasarkan klasifikasi kajian fenomenologi yang dikemukakan oleh Daymond dan Halloway, maka penulis menggunakan jenis penelitian fenomenologi sosial. Sebab dalam fokus penelitian penulis terkait dengan tindakan sosial yang merujuk pada perilaku elit agama dan elit suku dalam memainkan peranannya untuk mendukung kandidat Piter

Gusbager dan Wahfir Kosasih pada pemilu pada di kabupaten Keerom tahun 2020. Penulis ingin mengetahui dan mendeskripsikan tindakan elit agama dan elit suku tersebut.

1.9.3 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian eksploratif. Menurut Arikunto bahwa penelitian eksploratif merupakan jenis penelitian sosial yang bertujuan untuk menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu (Arikunto, 2008: 14). Penelitian yang bersifat eksploratif juga berusaha menggali pengetahuan baru untuk mengetahui suatu fenomena atau permasalahan yang sedang dan atau dapat terjadi.

Penggunaan desain penelitian eksploratif dalam penelitian ini adalah untuk menggali informasi, mengetahui dan menggambarkan peran elit lokal yang terdiri dari elit agama dan elit suku dalam pemenangan kandidat Piter Gusbager dan Wahfir Kosasih pada Pemilu pada di kabupaten Keerom tahun 2020.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Creswell prosedur-prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, meliputi empat jenis strategi yaitu observasi, wawancara, studi dokumen, serta materi audio dan visual (Creswell, 2016: 53). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua 23 literature pengumpulan data.

- a. Wawancara. Teknik pengumpulan data ini berguna untuk mengumpulkan data primer. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti dapat melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadapan-hadapan) dengan informan. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur, peneliti menggunakan kerangka pertanyaan-pertanyaan untuk ditanyakan dan pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat berkembang agar peneliti dapat memperoleh informasi sesuai dengan data yang dibutuhkan. Data primer yang digali merupakan peran dari elit agama dan elit suku dalam membentuk opini publik, mempengaruhi pilihan politik masyarakat dan memobilisasi masyarakat untuk mendukung dan memilih kandidat Piter Gusbager dan Wahfir Kosasih pada Pemilu pada di kabupaten Keerom tahun 2020. Data primer didapatkan peneliti melalui wawancara dengan informan-informan yang sudah ditentukan

oleh peneliti, yakni Benyamin Kogoya kepala suku Puncak Jaya, Peleki Enembe kepala suku Tolikara, Herman Tafor kepala suku Bate, Pendeta Yepersin Kogoya, Pendeta Ikadenus Hisage dan Kiai Mustajar.

- b. Studi dokumentasi. Untuk memperoleh data sekunder maka dalam penelitian ini juga dilakukan melalui studi dokumentasi sebagai sumber data tertulis. Pengumpulan data sekunder diperoleh melalui literature buku, jurnal, artikel, majalah, koran dan media massa. Ada beberapa data yang didapatkan dari studi dokumentasi. Pertama, hasil pemilukada tahun 2020 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Keerom. Kedua, teori elit dan konsep peranan dari buku *Penguasa Kelompok Elite: Peranan Elit-Penentu dalam Masyarakat Modern* karya Suzanne Keller, *Peranan Elite Dalam Proses Modernisasi: Suatu Studi Kasus di Muna* karya La Ode Abdul Rauf, *Sosiologi Politik* karya Maurice Duverger, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* karya Ter B. Haar, *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung* karya Hasan Mukmin, *Teori Peranan* karya Soerjono Soekanto, *Perilaku Organisasi* karya Miftah Thoha, *Sosiologi: Teks Pengantar & Terapan* karya J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, serta *Dasar-Dasar Organisasi* karya Sutarto. Ketiga, jumlah penduduk, jumlah agama dan penganut agama mayoritas, keadaan ekonomi dan geografis yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten Keerom tahun 2021 yang berjudul *Kabupaten Keerom Dalam Angka 2020*.

1.9.5 Informan

Penelitian ini menggunakan teknik sampel *non probability sampling*. Menurut Sugiyono, *non probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono 2014). Metode *non probability sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling*. Menurut Creswell, dalam penelitian kualitatif objek yang akan diteliti ditentukan oleh peneliti (*purposive sampling*) yaitu melakukan pemilihan atau seleksi terhadap orang atau tempat yang terbaik yang dapat membantu kita dalam memahami sebuah fenomena (Creswell, 2016: 214). Dengan kata lain, informan merupakan orang yang paling memahami atau mengetahui fenomena dan situasi dari objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini, informan yang dipilih terdiri dari elit suku yang mewakili suku Puncak Jaya, Tolikara dan Bate dan elit agama yang mewakili umat agama Protestan dan Islam. Selain itu, ada ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) kabupaten Keerom sebagai pengawas pelaksanaan pemilukada, serta tim sukses dari pasangan calon Piter Gusbager dan Wahfir Kosasih.

Tabel 1. 2 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Landasan
1.	Benyamin Kogoya	Kepala Suku Puncak Jaya	Representasi masyarakat Puncak Jaya di Keerom
2.	Peleki Enembe	Kepala Suku Tolikara	Representasi masyarakat Tolikara di Keerom
3.	Herman Tafor	Kepala Suku Bate	Representasi masyarakat asli Keerom
4.	Mambrasar	Pendeta	Representasi Persekutuan Gereja-Gereja Keerom (PGGK)
5.	Yapersin Kogoya	Pendeta	Representasi Gereja Injili di Indonesia (GIDI)
6.	Ikadenus Hisage	Pendeta	Representasi Gereja Pentekosta di Indonesia (GPDI)
7.	Herman Yocku	Pendeta	Representasi Gereja Kristen Kalam Kudus (GKKK)
8.	Mustajar	Kiai	Representasi kelompok Muhammadiyah
9.	Matius Sada	Jemaat Katolik dan tim sukses	Representasi umat Katolik
10.	Lawon Wonda	Tim sukses pasangan calon nomor urut dua	Representasi dari kelompok tim sukses
11.	Mekison Kogoya	Tim sukses pasangan calon nomor urut satu	Representasi dari kelompok tim sukses

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2023

1.9.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian. Tanpa instrumen, data tidak dapat di kumpulkan, dan bila tidak adanya data maka penelitian pun tidak bisa di lakukan. Instrumen penelitian terdiri dalam beberapa jenis,

diantaranya kuesioner, studi pustaka dan wawancara. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan instrumen wawancara kepada narasumber-narasumber yang sesuai dengan objek penelitian.

Tabel 1. 3 Instrumen Penelitian

Konsep	Dimensi	Indikator	Item
Teori elit	Elit moral	Penasihat kandidat	1) Apakah ada saran dan masukan yang Anda berikan kepada pasangan kandidat Piter Gusbager dan Wahfir Kosassih dalam merumuskan isu-isu politik dalam kampanye politik? 2) Apa saja masukan Anda kepada pasangan kandidat Piter Gusbager dan Wahfir Kosassih mengenai isu-isu agama yang harus diakomodir dan di hindari dalam Pemilukada? 3) Apakah ada faktor pendukung dan penghambat bagi Anda sebagai penasihat pasangan kandidat Piter Gusbager dan Wahfir Kosassih?
		Kampanye politik	1) Bagaimana strategi Anda dalam melakukan kampanye politik untuk memenangkan pasangan kandidat Piter Gusbager dan Wahfir Kosassih? 2) Apa saja isu-isu politik dalam kampanye politik yang Anda lakukan? 3) Apakah ada gagasan baru yang anda ciptakan dalam kampanye politik sebagai strategi dalam pemenangan pasangan calon Piter Gusbager dan Wahfir Kosasih dalam Pemilukada tahun 2020?
		Mobilisasi dukungan masyarakat	1) Bagaimana strategi yang anda lakukan untuk memobilisasi anggota anda untuk memenangkan pasangan calon Piter Gusbager dan Wahfir Kosasih dalam Pemilukada tahun 2020? 2) Apa saja bentuk kegiatan dan agenda yang Anda lakukan untuk memobilisasi dukungan anggota masyarakat Anda? 3) Apakah dalam proses anda memobilisasi anggota masyarakat, ada pendekatan ultimatum?

Konsep	Dimensi	Indikator	Item
			4) Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat peran Anda dalam memobilisasi dukungan anggota masyarakat?
		Pembentuk opini publik	1) Bagaimana cara Anda mempengaruhi pilihan politik anggota masyarakat untuk mendukung dan memilih pasangan kandidat Piter Gusbager dan Wahfir Kosassih? 2) Apakah dalam mempengaruhi pilihan politik anggota masyarakat, ada kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik yang Anda berikan kepada masyarakat? 3) Apa saja bentuk kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik? 4) Apa saja materi atau isu-isu yang anda berikan dalam sosialisasi kepada anggota masyarakat anda untuk memenangkan pasangan calon Piter Gusbager dan Wahfir Kosasih? 5) Bagaimana cara anda membentuk dan membangun reputasi atau citra positif pasangan calon Piter Gusbager dan Wahfir Kosasih kepada anggota masyarakat? 6) Apa saja faktor penghambat dan pendukung peran Anda dalam mempengaruhi pilihan politik anggota masyarakat?
		Konsolidasi jaringan sosial	1) Apakah anda memperluas dukungan dengan membangun jejaring dengan elit-elit lain? 2) Faktor apa saja yang menyatukan kepentingan diantar elit untuk mendukung pasangan kandidat Piter Gusbager dan Wahfir Kosasih? 3) Apa saja faktor pendukung dan penghambat peran Anda dalam melakukan konsolidasi jaringan sosial dengan elit lainnya?
		Donatur sumber daya finansial	1) Apakah Anda memfasilitasi proses pelaksanaan kampanye politik pasangan kandidat Piter Gusbager dan Wahfir Kosasih? 2) Apakah ada faktor pendukung dan penghambat bagi Anda dalam memfasilitasi proses pelaksanaan kampanye politik?
	Elit fungsional	Penasihat kandidat	1) Apakah ada saran dan masukan yang Anda berikan kepada pasangan kandidat Piter Gusbager dan Wahfir Kosasih dalam

Konsep	Dimensi	Indikator	Item
			merumuskan isu-isu politik dalam kampanye politik? 2) Apa saja masukan Anda kepada pasangan kandidat Piter Gusbager dan Wahfir Kosassih mengenai isu-isu suku yang harus diakomodir dan di hindari dalam Pemilukada? 3) Apakah ada faktor pendukung dan penghambat bagi Anda sebagai penasihat pasangan kandidat Piter Gusbager dan Wahfir Kosassih?
		Kampanye politik	1) Bagaimana strategi Anda dalam melakukan kampanye politik untuk memenangkan pasangan kandidat Piter Gusbager dan Wahfir Kosassih? 2) Apa saja isu-isu politik dalam kampanye politik yang Anda lakukan? 3) Apakah ada gagasan baru yang anda ciptakan dalam kampanye politik sebagai strategi dalam pemenangan pasangan calon Piter Gusbager dan Wahfir Kosasih dalam Pemilukada tahun 2020?
		Mobilisasi dukungan masyarakat	1) Bagaimana strategi yang anda lakukan untuk memobilisasi anggota anda untuk memenangkan pasangan calon Piter Gusbager dan Wahfir Kosasih dalam Pemilukada tahun 2020? 2) Apa saja bentuk kegiatan dan agenda yang Anda lakukan untuk memobilisasi dukungan anggota masyarakat Anda? 3) Apakah dalam proses anda memobilisasi anggota masyarakat, ada pendekatan ultimatum? 4) Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat peran Anda dalam memobilisasi dukungan anggota masyarakat?
		Pembentuk opini publik	1) Bagaimana cara Anda mempengaruhi pilihan politik anggota masyarakat untuk mendukung dan memilih pasangan kandidat Piter Gusbager dan Wahfir Kosassih? 2) Apakah dalam mempengaruhi pilihan politik anggota masyarakat, ada kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik yang Anda berikan kepada masyarakat?

Konsep	Dimensi	Indikator	Item
			3) Apa saja bentuk kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik? 4) Apa saja materi atau isu-isu yang anda berikan dalam sosialisasi kepada anggota masyarakat anda untuk memenangkan pasangan calon Piter Gusbager dan Wahfir Kosasih? 5) Bagaimana cara anda membentuk dan membangun reputasi atau citra positif pasangan calon Piter Gusbager dan Wahfir Kosasih kepada anggota masyarakat? 6) Apa saja faktor penghambat dan pendukung peran Anda dalam mempengaruhi pilihan politik anggota masyarakat?
		Konsolidasi jaringan sosial	1) Apakah anda memperluas dukungan dengan membangun jejaring dengan elit-elit lain? 2) Faktor apa saja yang menyatukan kepentingan diantar elit untuk mendukung pasangan kandidat Piter Gusbager dan Wahfir Kosasih? 3) Apa saja faktor pendukung dan penghambat peran Anda dalam melakukan konsolidasi jaringan sosial dengan elit lainnya?
		Donatur sumber daya finansial	1) Apakah Anda memfasilitasi proses pelaksanaan kampanye politik pasangan kandidat Piter Gusbager dan Wahfir Kosasih? 2) Apakah ada faktor pendukung dan penghambat bagi Anda dalam memfasilitasi proses pelaksanaan kampanye politik?
	Elit strategis	Penasihat kandidat	4) Apakah ada saran dan masukan yang Anda berikan kepada pasangan kandidat Piter Gusbager dan Wahfir Kosasih dalam merumuskan isu-isu politik dalam kampanye politik? 5) Apakah ada faktor pendukung dan penghambat bagi Anda sebagai penasihat pasangan kandidat Piter Gusbager dan Wahfir Kosasih?
		Kampanye politik	1) Bagaimana strategi Anda dalam melakukan kampanye politik untuk memenangkan pasangan kandidat Piter Gusbager dan Wahfir Kosasih? 2) Apa saja isu-isu politik dalam kampanye politik yang Anda lakukan?

Konsep	Dimensi	Indikator	Item
			3) Apakah ada gagasan baru yang anda ciptakan dalam kampanye politik sebagai strategi dalam pemenangan pasangan calon Piter Gusbager dan Wahfir Kosasih dalam Pemilu pada tahun 2020?
		Mobilisasi dukungan masyarakat	1) Bagaimana strategi yang anda lakukan untuk memobilisasi anggota anda untuk memenangkan pasangan calon Piter Gusbager dan Wahfir Kosasih dalam Pemilu pada tahun 2020? 2) Apa saja bentuk kegiatan dan agenda yang Anda lakukan untuk memobilisasi dukungan anggota masyarakat Anda? 3) Apakah dalam proses anda memobilisasi anggota masyarakat, ada pendekatan ultimatum? 4) Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat peran Anda dalam memobilisasi dukungan anggota masyarakat?
		Membentuk opini publik	1) Bagaimana cara Anda mempengaruhi pilihan politik anggota masyarakat untuk mendukung dan memilih pasangan kandidat Piter Gusbager dan Wahfir Kosasih? 2) Apakah dalam mempengaruhi pilihan politik anggota masyarakat, ada kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik yang Anda berikan kepada masyarakat? 3) Apa saja bentuk kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik? 4) Apa saja materi atau isu-isu yang anda berikan dalam sosialisasi kepada anggota masyarakat anda untuk memenangkan pasangan calon Piter Gusbager dan Wahfir Kosasih? 5) Bagaimana cara anda membentuk dan membangun reputasi atau citra positif pasangan calon Piter Gusbager dan Wahfir Kosasih kepada anggota masyarakat? 6) Apa saja faktor penghambat dan pendukung peran Anda dalam mempengaruhi pilihan politik anggota masyarakat?

Konsep	Dimensi	Indikator	Item
		Konsolidasi jaringan sosial	1) Apakah anda memperluas dukungan dengan membangun jejaring dengan elit-elit lain? 2) Faktor apa saja yang menyatukan kepentingan diantar elit untuk mendukung pasangan kandidat Piter Gusbager dan Wahfir Kosassih? 3) Apa saja faktor pendukung dan penghambat peran Anda dalam melakukan konsolidasi jaringan sosial dengan elit lainnya?
		Donatur sumber daya finansial	1) Apakah Anda memfasilitasi proses pelaksanaan kampanye politik pasangan kandidat Piter Gusbager dan Wahfir Kosassih? 2) Apakah ada faktor pendukung dan penghambat bagi Anda dalam memfasilitasi proses pelaksanaan kampanye politik?

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2023

1.9.7 Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data yang berhubungan dengan objek penelitian, selanjutnya dilakukan pengelompokkan data dengan menyeleksi data yang sesuai dengan pokok permasalahan. Klasifikasi data dilakukan berdasarkan indikator dalam teori dan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Altinay dan Paraskevas, analisis data kualitatif adalah interpretasi konsep dari keseluruhan data yang ada dengan menggunakan strategi analitik yang bertujuan untuk mengubah atau menerjemahkan data mentah ke dalam bentuk uraian atau deskripsi dan eksplanasi dari fenomena yang sedang diteliti dan dipelajari (Altinay & Paraskevas, 2008: 167).

Langkah-langkah Analisis menurut Miles dan Huberman (Sudiyono, 1992: 50) dibagi dalam tiga tahapan yaitu:

- a. *Data Reduction* (reduksi data). Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti.

Pada tahap reduksi data sangat berkaitan dengan proses pengumpulan data, karena data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan di reduksi untuk

memudahkan peneliti. Dalam melakukan reduksi data peneliti melakukan beberapa tahap, yakni *pertama* seleksi data. Proses ini peneliti memilih data-data yang penting dan pokok dari hasil wawancara dengan narasumber dan dari studi dokumen yang sesuai dengan judul penelitian. Karena dalam proses wawancara, para narasumber kadang kala memberikan data-data yang tidak sesuai dengan kebutuhan penelitian. Melalui proses ini, data-datanya akan lebih sederhana dan spesifik. *Kedua*, meringkas data. Setelah menyeleksi data, peneliti meringkas data yang telah dipilih berdasarkan uraian singkat. Uraian singkat ini meliputi informasi yang objektif dari hasil wawancara dan studi dokumen yang telah direduksi. *Ketiga*, menggolongkan data. Setelah melakukan seleksi dan ringkas data, peneliti mengelompokkan dan menggolongkan hasil temuan yang dipilih. Data-data yang sejenis penulis kelompokkan menjadi satu untuk memudahkan peneliti dalam menyajikan data.

- b. *Data Display* (penyajian data). Penyajian yang dimaksud merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

Pada tahap ini penulis melakukan penyajian data bersifat naratif dengan menggunakan kata-kata atau kalimat. Penyajian data terdiri dari informasi yang sudah tersusun dari hasil reduksi data. Penyajian data dalam bentuk narasi memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi. Peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapatkan bisa disimpulkan dan memiliki makna untuk menjawab masalah penelitian.

- c. Penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung. *Data display* yang didukung oleh data-data dapat disajikan menjadi kesimpulan yang kredibel.

Pada tahap ini, peneliti berusaha mencari makna dan arti, keteraturan, pola-pola serta alur sebab-akibat dari hasil temuan penelitian yang di narasikan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang kredibel.

1.10 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang keadaan geografi, penduduk, agama, budaya dan ekonomi di kabupaten Keerom. Bagian ini merupakan data pendukung untuk analisis pada bab-bab selanjutnya, karena struktur masyarakat di kabupaten Keerom yang menjadi objek penelitian merupakan bagian dari kehidupan elit lokal.

BAB III. PERAN ELIT LOKAL DALAM PEMENANGAN KANDIDAT PITER GUSBAGER DAN WAHFIR KOSASIH

Pada bab ini menjelaskan peran elit lokal dalam memenangkan kandidat Piter Gusbager dan Wahfir Kosasih. Pada bagian ini memfokuskan pada peran elit lokal dalam membentuk opini anggota masyarakatnya, memberi bimbingan dan petunjuk serta memobilisasi anggota masyarakatnya dalam memenangkan kandidat Piter Gusbager dan Wahfir Kosasih.

BAB IV. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PERAN ELIT LOKAL DALAM PEMENANGAN KANDIDAT PITER GUSBAGER DAN WAHFIR KOSASIH

Pada bab ini menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung peran elit lokal dalam memenangkan kandidat Piter Gusbager dan Wahfir Kosasih.

BAB V. KESIMPULAN

Bagian ini merupakan hasil dari proses analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya tentang peran elit lokal dalam kemenangan kandidat Piter Gusbager dan Wahfir Kosasih, serta saran kepada peneliti selanjutnya untuk lebih memperdalam analisis terhadap semua elit lokal yang berperan dalam Pemilukada.